

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia yang semakin maju ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Hal inilah yang mendorong suatu negara untuk terus memajukan pemerintahannya. Mulai dari desa sampai pemerintahan pusat kota turut menjadi perhatian khusus bagi suatu negara untuk memajukan perekonomiannya. Di Indonesia, desa merupakan suatu bagian dari sistem pemerintah negara yang otonominya asli, bulat dan utuh serta diberikan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan urusan pemerintah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. BUMDes menjadi wadah yang menghimpun dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan pemikiran segala asset ekonomis yang ada didesa dan dikelola sepenuhnya masyarakat desa. Peranan BUMDes diharapkan dapat menurunkan indeks kemiskinan dan mengangkat status sosial keluarga tidak mampu menjadi keluarga sejahtera sehingga pemerataan ekonomi di desa terealisasi (Nona Ivon et al., 2023)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa.(Suaidah et al., 2024).

Menurut (Kerja et al., n.d.) pendirian BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus BUMDes, maka sangat diperlukan penyusunan laporan keuangan yang terjadi selama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beroperasi. Laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap pihak internal maupun eksternal. Salah satu indikator keberhasilan penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes ialah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang memiliki dasar hukum (Melatyugra et al., 2020), oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada standar akuntansi keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlaksana dengan baik apabila dalam penyusunan laporan keuangan diterapkan prinsip akuntansi yang benar dan tepat (Fathul et al., 2022). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebaiknya berlandaskan dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari semua pihak dengan pedoman standar keuangannya.(Sak et al., 2023)

Semakin berkembangnya unit-unit usaha pada BUMDes, membuat laporan keuangan yang akan dibuat oleh BUMDes semakin kompleks. Maka dari itu, diperlukan suatu rancangan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes yang terukur dan sistematis. Dengan adanya laporan keuangan yang sudah tersusun berdasarkan SAK EMKM akan lebih memudahkan BUMDes untuk melihat kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Namun selain hal-hal di atas ternyata pernah ditemukan masalah yang terjadi pada BUMDes Amarta Desa Patas, Bali dimana modal yang awalnya sebesar Rp 1 M saat ini hanya tersisa Rp 21 Juta. Anwar (2019) menyatakan bahwa permasalahan BUMDes Amarta ini dilakukan oleh pengurusnya sendiri, yang mana beberapa pengurus BUMDes menilep dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Hal ini terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar masyarakat Desa Patas di GOR Amarta Yudha bahwa BUMDes Desa Patas terindikasi dengan adanya laporan keuangan yang tersisa hanya Rp 21 Juta dari modal awal sebesar Rp 1

M. Sejak awal berdiri BUMDes Amarta hanya sekali memberikan laporan pertanggung jawaban, yakni bulan juli tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban ditolak oleh warga karena dianggap mengada-ada dengan mencantumkan keuntungan sebesar Rp 30 Juta. Banyak kejanggalan lainnya yang ditemukan sehingga permasalahan ini sudah direkomendasikan kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika, hal ini tidak ditindak lanjuti maka akan berdampak banyak hal salah satunya kerugian yang dialami warga, desa dan negara. Karena dana BUMDes berasal dari hibah pemerintah Provinsi Bali melalui Program Gerbang Sadu Mandara, LPMD dan pemerintah desa (<https://balitribune.co.id>).

Penelitian ini merupakan model replika atas penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh (Nona Ivon et al.,2023). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu adanya perbedaan unit bisnis pada BUMDes dan objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya masalah pada laporan keuangan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia, pengawasan yang belum memadai dan penyusunan laporan keuangan yang belum optimal serta juga adanya perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menarik peneliti melakukan penelitian yang didasarkan adanya fenomena di atas. Maka peneliti ingin mengkaji kembali dan mengambil judul tentang **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dan digali agar lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkupnya yaitu:

1. Melakukan pendataan BUMDes di desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Data penelitian dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan akhir periode jabatan pengurus desa.
3. Meneliti dan menganalisis laporan keuangan (laporan neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan) pada BUMDes Lugusari yang sesuai dengan SAK EMKM

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa penerapan standar akuntansi keuangan EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pembaca dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan standar akuntansi keuangan pada BUMDes serta dapat digunakan sebagai alat perbandingan dengan penelitian sebelumnya sehingga mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Mampu memahami dan menambah wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

b. Bagi BUMDes di Desa Lugusari

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu BUMDes desa Lugusari dalam Menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM